

UPAYA DIPLOMATIK MALAYSIA TERHADAP MYANMAR DALAM MENANGANI PEMBANTAIAN ETNIS MUSLIM ROHINGYA (2015-2017)

Oleh : Ranti Yunita

ranti.yunita@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. M. Saeri, M.Hum

Bibliography : 24 Journals, 19 Books, 2 Essay and 15 Websites.

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research describes the efforts of diplomatic pressure in Malaysia against Myanmar in dealing with the slaughter of Rohingya ethnic Muslims then, explain Malaysia and Myanmar diplomatic relations before the heated conflict of Rohingya Muslim ethnic massacre in Rakhine. The purpose of this study was to analyze and find out the shape and efforts of Malaysia to help the Muslim ethnic Rohingya. The humanitarian crisis that occurred in Myanmar received various criticisms from several countries such as Malaysia, Indonesia and other countries. This is due to the large number of Rohingya refugees who have fled to neighboring countries to get protection. the large number of Rohingya refugees can disrupt security stability in the Southeast Asia region, and cause concern for the country targeted by Rohingya refugees. Malaysia, one of ASEAN members, protested against the actions of the Myanmar government which had violated human rights towards its ethnic groups. Malaysia considers Myanmar's actions out of bounds and must be stopped so that there are no more victims. As for Malaysia's efforts to help Rohingya ethnic groups such as doing diplomacy and inviting ASEAN member countries and to work together to help their spirits. The existence of non-intervention principles that are used asean makes this problem unresolved.

Keywords: Diplomacy, Ethmic Cleansing, Principle of non-intervention

PENDAHULUAN

Pembantaian Etnis Muslim Rohingnya yang terjadi di Myanmar merupakan pelanggaran HAM di dalam Negeri, sehingga membuat beberapa Negara memprotes terhadap tindakan pembantaian Etnis Muslim Rohingnya. Salah satunya Malaysia, melalui tekanan diplomatiknya mereka mengancam tindakan dari pemerintah Myanmar yang telah melanggar HAM terhadap Etnis Muslim Rohingya.

Hal itu menimbulkan keretakan antara Malaysia dan Myanmar. Sebelumnya, Malaysia dan Myanmar telah melangsungkan hubungan diplomatik pada tahun 1980 yakni kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan dimana terdapat faktor utamanya yakni ketika Myanmar telah mendeklarasikan berakhirnya sosialisme dinegaranya, sehingga Myanmar juga menginisiasi membuka pintu kebijakan untuk investasi luar negeri pada tahun 1989. Oleh karenanya, banyak negara seperti Malaysia mulai mencari peluang ekonomi (bisnis dan investasi) di Negara Myanmar (Sidhu) ¹.

Kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang bekerjasama yakni Malaysia dan Myanmar dengan melakukan ekspor impor maupun investasi. Serta dengan harapan juga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Negara Malaysia dan Myanmar dengan melakukan kerjasama

¹ *Equal Rights Trust* (London: Equal Only in Name The Human Rights partnership with The Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, 2014), 24.

ekonomi perdagangan. Selain itu, Malaysia dan Myanmar juga bekerjasama dalam bidang pariwisata. Tahun 2001 adanya *billateral tourism agreement* antara Myanmar dengan Malaysia yaitu kerjasama mengenai Malaysia *Healthcar Travel Council* yang telah bermitra dengan badan pariwisata Myanmar mengenai pariwisata kesehatan di Malaysia ².

Tahun 2012 Malaysia dan Myanmar juga menjalin kerjasama yaitu ketika Malaysia akan mengadakan kursus pelatihan diplomatik untuk lima puluh (50) pejabat-pejabat di Negara Myanmar ³. Penganjuran kursus ini merupakan salah satu hasil perbincangan semasa kunjungan resmi dari perdana Menteri Malaysia, Sri Najib Tun Hj Abdul Razak bersama kunjungan resmi Sri Anifah Hj Aman, Menteri Luar Negeri Malaysia ke Negara Myanmar ⁴. Kursus pelatihan institusional diplomatik dan Kementerian Luar Negeri Malaysia di bawah penahanan program kerjasama teknis Malaysia dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan peningkatan kemampuan penjabat pemerintah Myanmar ketika menjadi pengurus ASEAN pada tahun 2014.

Seiring dengan perkembangan zaman, di dunia internasional sering ada masalah yang terjadi seperti kejahatan kemanusiaan, ekonomi, pendidikan kesehatan, atau keamanan internasional.

² Ibid,hal.67

³ Abdelkader E,(2013), “ The Malaysia Muslims in Myanmar,” *Past, Present, and Future, Oregon Review of International Law*, 15 (July 2013): 393.

⁴ Julia Hoffman, Andre Nolkaemper, and Isabelle Swerisses, *Responsibility to Protect -From Principle to Practice*, (Amsterdam: Pallas Publication and Amsterdam University Press, 2012), 23.

Tidak ada keraguan bahwa di Asia Tenggara ada masalah kemanusiaan yang juga dapat mengganggu keamanan internasional. Secara khusus, seperti yang terjadi di wilayah Rakhine, Myanmar. Konflik antara warga Myanmar yang didukung militer dengan etnis Muslim Rohingya belum menemukan titik terang. Sikap diam pemerintah Myanmar tampaknya membanjiri pembantaian Etnis Muslim Rohingya tersebut ⁵. Hal ini membuat kedua negara yang dulunya pernah menjalin kerjasama yakni Malaysia dan Myanmar mulai merenggang dikarenakan Malaysia menganggap Myanmar tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya khususnya etnis Muslim Rohingya ⁶. Akibatnya banyak pengungsi Rohingya yang di usir dari kediamannya, PBB meminta negara-negara yang berada di kawasan tersebut untuk menampung korban pengungsi rohingya, seperti Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Thailand dan negara lainnya. Ada beberapa negara yang menolak kedatangan pengungsi rohingya salah satunya Malaysia, dimana mereka memiliki model pemerintahan tersendiri dalam menentukan arah kebijakannya sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh Negara Malaysia maupun sesuai dengan kebutuhan negara. Hal ini tidak terlepas dari politik yang dijalankan oleh Pemerintah Negara Malaysia.

Adanya masalah yang terjadi seperti pengungsi Rohingya di Myanmar dan dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara membuat Malaysia sebagai anggota dari

negara di ASEAN sendiri juga harus melakukan tindakan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah mengenai pengungsi Rohingya tersebut. Dan di tambah lagi Malaysia tidak termasuk negara yang menandatangani konvensi pengungsi, hal inilah yang mendasari mengapa Malaysia menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Namun setelah beberapa minggu kemudian Malaysia kembali menerima kedatangan pengungsi rohingya, karena mereka masih merasa satu persaudaraan dengan etnis rohingya. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Malaysia dalam menyikapi masalah para pengungsi Rohingya ini memiliki dinamika kebijakan yang berbeda. Dimana pada mulanya menolak untuk dapat menerima pengungsi Rohingya namun beberapa minggu kemudian, mereka mulai menerima kedatangan pengungsi rohingya.

Langkah-langkah dari Malaysia dalam menangani pengungsi Rohingnya seperti memberikan kartu tinggal sementara untuk pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar untuk tetap tinggal di Malaysia hingga situasi aman untuk kembali lagi. Bantuan kepada Rohingya tersebut diberikan oleh Malaysia seperti halnya memberikan izin kerja informal bagi para pengungsi Rohingya di Malaysia meskipun Malaysia tidak menandatangani konvensi pengungsi PBB, para pengungsi tersebut diizinkan bekerja dengan berdagang atau berniaga, kemudian memungut sampah untuk dijadikan bahan daur ulang, dan bekerja di bangunan ataupun konstruksi.

Terlepas dari langkah-langkah positif ini, perjanjian konstruktif dengan Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara dan mengakhiri diskriminasi yang sistemik dan tanpa henti terhadap Rohingya harus

⁵ Arendshorst John, "Dilemma of Non-Interference Myanmar Human Rights and the ASEAN Charter" 16 (June 2009): 98.

⁶ Ibid, Hal. 105.

diupayakan. Kemudian adanya dinamika kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia pun juga turut berdampak kepada hubungan bilateral yang telah mereka jalankan sejak lama, karenanya terdapat masalah korban pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan belum terselesaikan hingga hal tersebut menjadi perhatian dunia internasional. Akibatnya, beberapa Negara ikut memprotes terhadap pembantaian etnis Muslim Rohingnya salah satunya Malaysia mereka menganggap Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM didalam Negeri.

Sebagai Negara anggota ASEAN, Malaysia menganggap pembantaian etnis Muslim Rohingnya tersebut bukan lagi masalah dalam negeri melainkan masalah didalam kawasan regional ASEAN. Hal ini membuat Perdana Menteri Malaysia Tun Najib Razak beserta para anggota kabinetnya melakukan protes di kedutaan Myanmar yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia⁷, sehingga hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Myanmar dan Malaysia saat ini sedang mengalami gejolak dikarenakan tindakan Myanmar terhadap kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan kepada kaum minoritas Rohingnya di Myanmar. Hal ini juga mengganggu hubungan diplomasi kedua belah pihak yakni antara Malaysia dengan Myanmar. Hubungan dua anggota ASEAN Malaysia dan Myanmar menegang setelah perdana menteri Malaysia Najib Razak di tahun 2016 mengatakan bahwa telah terjadi genosida di Myanmar dan meminta dunia

internasional segera intervensi. Pemerintah Myanmar telah menghentikan pengiriman tenaga kerja Burma ke Malaysia. Penghentian ini dinilai akan berdampak karena selama ini Malaysia sangat bergantung pada buruh impor, berdasarkan data yang dihimpun Reuters, saat ini terdapat 147.000 pekerja migran asal Myanmar di Malaysia⁸.

Selain menyetop pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, pemerintah Myanmar juga telah memanggil duta besar Malaysia di Myanmar untuk menyatakan keberatan atas pernyataan dari Najib Razak. Begitu juga dengan Malaysia yang memanggil duta besar Myanmar untuk memprotes tindakan kekerasan terhadap muslim Rohingnya selain itu, Malaysia juga membatalkan pertandingan tim sepak bola di bawah U-22 dengan Myanmar sebagai bentuk protes. Mengenai pembantaian Etnis Muslim Rohingnya yang dilakukan Myanmar merupakan urusan dalam Negara Myanmar hal ini menjadikan Myanmar selalu menggunakan prinsip non intervensi. Sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan dalam suatu Negara akan terus berlangsung dan individu maupun kelompok yang mengalami tekanan dari pemerintah tersebut tidak dapat mengakses aspek-aspek utama dari *human security* yang dicanangkan oleh PBB yaitu keamanan bagi diri sendiri, keamanan kesehatan, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan komunitas, dan keamanan politik, dimana semua itu tidak didapat oleh etnis Muslim Rohingnya.

⁷ Alison Brysk, *Globalization and Human Rights, 1860-1870* (London: University of California Press, 1995), 207- 210.

⁸ Tri, Joko Waluyo, “*Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingnya dan Etnis Rakhine di Myanmar konflik tak seimbang.*” *Jurnal Transnasional* 19 (Juni 2008): 132.

Dunia internasional baik dari kalangan Negara-Negara maupun organisasi internasional seperti PBB juga tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar. Akibatnya salah satu Negara ASEAN yaitu Malaysia, melakukan tekanan diplomatik terhadap Myanmar yang dapat melanggar prinsip non intervensi, mereka memprotes terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Muslim Rohingnya. Malaysia menganggap pembantaian etnis Muslim Rohingnya yang terjadi di Myanmar sudah tentu berdampak bagi negara anggota ASEAN yang lain. Pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar bisa menimbulkan ancaman stabilitas internal bagi negara yang mereka datangi. Menanggapi permasalahan seperti ini, seharusnya prinsip non intervensi sudah mulai dapat dikesampingkan, karena selain memberikan dampak bagi Negara anggota yang lain permasalahan ini juga sangat tidak pantas dari sisi kemanusiaan.

Untuk membantu menjelaskan bagaimana upaya diplomatik Malaysia terhadap Myanmar dalam menangani pembantaian Etnis Muslim Rohingnya maka penulis akan menggunakan persepektif realis. Bagi kaum realis negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, sekaligus menenkankan hubungan antar negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah bahwa dalam tataran negara perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan suatu negara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu menentukan bagaimana cara mencapai kepentingan

agar mendapatkan hasil yang maksimal⁹. Kemudian, penulis juga menggunakan teori Diplomasi Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional dalam mencapai tujuannya.

Ada dua metode yang terdapat dalam teori diplomasi yaitu *hard diplomacy* dan *soft diplomacy*. *Hard diplomacy* adalah cara suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan pendekatan *hard power*, seperti kekuatan militer. Sedangkan *soft diplomacy* adalah cara suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan pendekatan sosial dan budaya. Bisa kita perhatikan bahwa negara - negara pada zaman dulu, ketika masa - masa terjadinya perang dunia, negara mengutamakan *hard diplomacy* dalam memenuhi national interestnya. Namun, seiring berjalannya waktu sudah banyak negara yang melakukan *soft diplomacy* dalam memberikan pengaruhnya.

Diplomasi juga merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi.

⁹ Viotti, Paul R. Dan Mark V. Kauppi, “*International relations Theory Realism, Pluralism, Globalis and Beyond*”, MA:A Viacom Company, 1998. Hal. 32.

Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini ¹⁰.

Diplomasi dan *power* (kekuatan) saling berhubungan dalam suatu negara, semakin besar *power* suatu negara, maka semakin besar pula efektivitas diplomasi dari suatu negara tersebut. Begitu pula dengan Malaysia, semakin tinggi *power* yang dimiliki Malaysia maka semakin baik pula diplomasi Malaysia dengan negara lain. Lalu, penulis menggunakan konsep keamanan manusia (*Human Security*) yang menjadi alasan etnis Rohingya untuk mengungsi karena keamanan dan kebutuhan hak-hak dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dalam studi hubungan internasional terdapat konsep keamanan yang membahas berbagai bentuk ancaman keamanan. Ancaman keamanan itu sendiri terbagi atas ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional.

Human security memiliki arti keamanan bagi manusia. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari adanya ancaman kelaparan, penyakit, serta penindasan. Keamanan berupa perlindungan dari gangguan yang dapat mendatangkan kerugian pada kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat bekerja, maupun kehidupan di masyarakat. Menurut Buzan dalam artikelnya “*security*” keamanan menjadi konsep yang debatable karena konsepsi mengenainya berbeda-beda dari satu individu ke individu lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

¹⁰ S L , Roy, *Diplomasi*, (Jakarta Utara, PT Raja Grafindo persada, 1995), 35.

Keamanan menurut Buzan dan Hansen menjadi semakin jelas berkaitan dengan tujuan politik serta norma dalam mendefinisikan keamanan sebagai sebuah konsep. Keamanan akan selalu menjadi konsep yang “memiliki garis penghubung” serta berkaitan dengan *referent object* secara khusus, lokasi eksternal ataupun internal, juga kepada satu atau beberapa sektor yang khususnya berkaitan dengan cara pandang dalam politik.

Keamanan manusia kemudian menanggapi ancaman keamanan secara terpadu. Keamanan manusia melindungi semua aspek kehidupan manusia mencakup lingkup keamanan individu dan masyarakat. Melibatkan aktor yang lebih luas, seperti masyarakat sipil, organisasi internasional, dan negara. Pelanggaran hak-hak asasi yang dialami Rohingya memerlukan peran dari berbagai pihak sehingga apa yang menimpa Rohingya dapat segera teratasi. Berbagai penindasan dan tindakan diskriminasi yang diterima oleh Rohingya merupakan ancaman terhadap kemanusiaan. Berdasarkan konsep keamanan di atas tentu saja etnis Rohingya tidak terpenuhi keamanannya. Masalah-masalah kemanusiaan, HAM, tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi Seorang individu terjadi pada etnis Muslim Rohingya. identitas kewarganegaraan mereka pun kini telah dihilangkan.

Tingkat analisa sangat diperlukan dalam sebuah penelitian termasuk penelitian dibidang Hubungan Internasional. Terdapat beberapa tingkat analisa dalam fenomena HI, namun tidak semua tingkat analisa dapat digunakan. Menurut Mohtar Mas'ood ada lima kategori yang penting untuk diketahui dalam menentukan tingkat

analisa dalam sebuah studi hubungan internasional, yakni perilaku individu, perilaku kelompok, Negara-Bangsa, dan system internasional. Pada penelitian ini tingkat analisa yang digunakan adalah analisa negara- Bangsa dimana Negara-Bangsa adalah pengambil keputusan tertinggi pada kebijakan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, masyarakat etnis Rohingya mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek. Diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar seperti penolakan status kewarganegaraan, kerja paksa, penyitaan properti secara sewenang-wenang, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan termasuk juga propaganda anti-Rohingya dan anti-Muslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan mempraktikkan ajaran agama, serta tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 1982.

Sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum kependudukan kolonial Inggris tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis, namun warga etnis Rohingya tidak termasuk didalamnya karena dianggap sebagai etnis Bengali yaitu etnis yang berasal dari Bangladesh¹¹.

¹¹ Tri, Joko Waluyo, "Konflik tak seimbang Etnis Rohingya dan Etnis rakhine di Myanmar konflik tak seimbang," jurnal transasional 06 (November 2018):35.

Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut menjadi penyebab terjadinya eksodus etnis Rohingya ke Bangladesh dan terus mendorong arus pengungsi baru ke negara-negara tetangga Myanmar lainnya seperti Thailand, Indonesia, Malaysia¹². Selama junta militer menguasai pemerintahan Myanmar, pada tahun 1982 muncul kebijakan baru yang disebut Burma Citizenship Law (BCL) dimana warga Rohingya tidak mendapat hak kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pendidikan serta pekerjaan yang layak dan cukup. Tidak seperti golongan etnis minoritas lainnya yang setidaknya diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, etnis Muslim Rohingya ini dianggap sebagai penduduk asing yang berasal dari Bangladesh. Selanjutnya, demokrasi yang telah diusung sejak tahun 2010 tidak membawa perubahan yang signifikan bagi etnis Rohingya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar telah menjadi perhatian publik Internasional. PBB menuduh Myanmar melakukan pembersihan etnis Muslim di Rohingya, setelah tentara Myanmar menembaki sedikitnya 30 orang di sejumlah desa yang dihuni Muslim Rohingya di daerah Rakhine dan membakar rumah-rumah mereka. Kasus pelanggaran HAM di Myanmar telah terjadi sejak 1962, dimana Muslim Rohingya dibatasi untuk mendapatkan pendidikan, penggunaan bahasa dan kebebasan beragama. Konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine tentu mengakibatkan kekalahan bagi etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas. Tindakan kejahatan

¹² "Eksodus merupakan kegiatan meninggalkan kota secara besar besaran," <http://brainly.co.id/tugas/1513470> (diakses pada 28 april 2016).

kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan sudah berlangsung sejak Myanmar belum merdeka.

Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terus berlanjut hingga Myanmar merdeka bahkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan dibentuknya UU Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan Rohingya dan beberapa etnis minoritas lainnya dari daftar etnis asli Myanmar, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa etnis yang akan diakui sebagai etnis asli Myanmar adalah etnis yang mampu membuktikan bahwa mereka mampu membuktikan memiliki nenek moyang yang sudah tinggal di Myanmar sejak tahun 1823¹³. Namun, meskipun sejarah menyatakan bahwa etnis Rohingya sudah ada di Myanmar sejak abad 7 Masehi, pemerintah Myanmar tetap meyakini etnis Rohingya sebagai imigran ilegal asal Bangladesh yang tidak berhak atas kewarganegaraan Myanmar.

Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terus berlanjut dan memuncak pada tahun 2012. Pada Juni 2012, etnis Buddha Rakhine melakukan serangan dan pembantaian terhadap etnis Rohingya dikarenakan adanya tuduhan bahwa seorang wanita Buddha telah diperkosa oleh warga etnis Rohingya. Pemberontakan tersebut mengakibatkan puluhan warga Muslim Rohingya tewas terbunuh. Konflik ini juga mengakibatkan Muslim Rohingya kehilangan tempat tinggalnya karena rusak dan terbakar saat konflik berlangsung. Konflik ini

menyebabkan sekitar 75 ribu rakyat etnis Muslim Rohingya mengungsi karena merasa terancam dengan adanya kekerasan antar dua kelompok etnis di wilayah Rakhine tersebut, akibatnya banyak pengungsi Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga guna mencari perlindungan¹⁴, kemudian hal ini juga menyebabkan terganggunya keamanan stabilitas kawasan asia tenggara dan negara-negara yang dituju pengungsi rohingya. Malaysia salah satu negara ASEAN memprotes tindakan dari pemerintah Myanmar yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Rohingya, sehingga hal ini Malaysia telah melanggar prinsip non intervensi yang telah dianut oleh negara anggota ASEAN. Sebelumnya, kedua negara ini juga pernah melangsungkan hubungan diplomatik sejak awal tahun 19-an, adapun bentuk kerjasama dari kedua negara ini seperti kerjasama dalam bentuk ekonomi dan perdagangan, kerjasama dalam bidang ilmu pendidikan dan teknologi, kemudian terdapat kerjasama dalam bidang pariwisata.

Tujuan kerjasama kedua negara ini yaitu sama-sama meningkatkan power dalam masing-masing negara dan saling membantu dalam meningkatkan eksistensinya. Semenjak adanya pembantaian etnis Muslim Rohingya yang dilakukan Myanmar membuat Malaysia bersama perdana Menteri Tun Najib Razak ikut memprotes tindakan Myanmar di kantor kedutaan Myanmar yang berada di Malaysia, hal ini tentu juga berdampak bagi hubungan kedua negara tersebut. Malaysia menganggap pembantaian yang terjadi pada etnis rohingya merupakan pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan hal ini harus segera

¹³ Ludfiani, A, krisis kemanusiaan dan upaya thailand mengatasi gelombang penungsi rohingya, 2rd ed, (2012),82-88.

¹⁴ Ibid, Hal. 110

dihentikan. Malaysia juga merasa terganggu adanya banyak pengungsi Rohingya yang banyak melarikan diri ke negara-negara tetangga terutama ke Malaysia, seperti yang diketahui Malaysia bukan termasuk anggota yang menandatangani konvensi pengungsi tahun 1951 dan tahun sebelumnya Malaysia telah menerima banyak pengungsi rohingya dengan jumlah yang banyak. Malaysia juga berharap pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis rohingya dapat dihentikan dan Malaysia menganggap konflik ini bukan lagi masalah dalam negeri Myanmar sendiri melainkan masalah kawasan bersama.

Akar masalah yang awalnya adalah pelanggaran HAM oleh pemerintah Myanmar terkait dengan identitas bangsa Rohingya, telah berkembang menjadi perdagangan orang, kerja paksa, buruh anak, dan bahkan menjadi isu terorisme. Ada dua faktor utama yang menyebabkan pro dan kontra ini. *Pertama* adalah definisi apakah dampak kasus Rohingya sudah memengaruhi negara lain atau tidak. Negara-negara ASEAN mengadopsi prinsip *non-interference* yang tertulis di dalam *Treaty of Amity and Corporation* (TAC) 1971 ketika pendirian ASEAN. Perdebatan dari prinsip *non-interference* saat ini juga terkait dengan prinsip *Responsible to Protect* (R2P) di bawah United Nations Prevention of Genocide. Prinsip tersebut menyatakan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak menjaminkannya dari intervensi internasional jika negara-negara tidak melindungi kesejahteraan warganya. Malaysia adalah negara yang terbuka menyatakan bahwa kasus Rohingya sudah masuk berdampak kepada kawasan dan dapat mengganggu keamanan stabilitas di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini

disebabkan lebih dari 14.000 etnis Rohingya yang saat ini ditampung di Malaysia. Malaysia tampaknya menggunakan *Responsible To Protect* (R2P) untuk terlibat dalam membantu mengatasi pembantaian etnis Muslim Rohingya.

Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menyatakan bahwa kasus Rohingya sudah masuk dalam krisis humanitarian¹⁵. Dalam pertemuan forum di ASEAN, ada beberapa negara yang berpihak pada Myanmar seperti Singapura, Thailand mereka menganggap konflik yang terjadi pada etnis Muslim Rohingya merupakan masalah internal Myanmar. Walaupun ada beberapa negara yang berpihak pada Myanmar, Malaysia berharap krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Muslim Rohingya bisa segera terselesaikan. Adapun upaya diplomatik Malaysia dalam menangani pembantaian etnis Muslim Rohingya yaitu peran Malaysia dalam kerangka OKI, peran Malaysia dalam kerangka ASEAN dan masih banyak peran Malaysia dalam hal membantu pengungsi Rohingya seperti memberika KTP sementara, memberikan pekerjaan, membantu mendirikan sekolah bagi anak-anak rohingya yang berada di Malaysia.

15

<https://nasional.sindonews.com/read/1241228/18/rohingya-dan-asean-1505832567> (diakses pada 03 Maret 2019).

KESIMPULAN

Malaysia yang merupakan negara Muslim dan juga sebagai anggota ASEAN, sudah sepatutnya membantu etnis Muslim Rohingya, tindakan diplomatik Malaysia yang memprotes Myanmar lewat Perdana Menteri dan Kabinetnya membuat beberapa negara Islam juga ikut membantu Rohingya dan mengancam tindakan dari Myanmar tersebut. Tindakan diplomatik Malaysia untuk membantu etnis Muslim Rohingya dapat dikatakan belum efektifitas, mengingat konflik ini sudah mulai lama terjadi, isu Rohingya bukan lagi hal asing untuk diperbincangkan adanya faktor keterlambatan yang membuat konflik ini belum terselesaikan. Berbeda dengan Malaysia Indonesia lebih menggunakan konsep soft power diplomacy dengan cara yang lebih persuasif, seperti memberikan bantuan kemanusiaan yang inklusif dan membuka komunikasi dengan seluruh pihak. Langkah demikian diharapkan lebih memberikan kontribusi positif dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya.

Proses diplomasi yang dilakukan Malaysia untuk membantu etnis Muslim Rohingya adalah dengan mengajak beberapa negara ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk merundingkan masalah Rohingya di dalam forum Organisasi ASEAN dan mencari solusi terbaik untuk membantu etnis Muslim Rohingya. namun adanya beberapa faktor yang menjadikan diplomasi dan kerjasama ini tidak sesuai yang diharapkan seperti ketika membahas masalah etnis Muslim Rohingya di dalam forum ASEAN, Myanmar tidak ikut menghadiri forum tersebut, kemudian masih ada beberapa negara yang tidak peduli dengan masalah Rohingya, dan

faktor lainnya berasal dari prinsip non intervensi yang digunakan ASEAN sehingga membuat masalah ini belum terselesaikan. Kekuatan diplomasi yang digunakan Malaysia bersama negara-negara lainnya hanya bisa membantu Rohingya dari segi material, dan bantuan-bantuan lainnya. Mereka hanya bisa menekan Myanmar dan tidak dapat menghentikan masalah tersebut, mengingat adanya prinsip non intervensi yang digunakan. Prinsip non intervensi, yang tercantum dalam Piagam ASEAN pada 1967, memberikan legitimasi kepada para anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan internal negara masing-masing. Faktor lainnya yang menjadikan masalah ini belum terselesaikan adalah kepemimpinan dari pemerintah Myanmar sendiri, yang tidak dapat mengatasi masalah HAM di dalam negerinya.

Sikap Myanmar yang tidak tegas dalam mengatasi etnis Rohingya yang menjadikan masalah ini terus berlangsung sampai sekarang dan menjadi perhatian dunia internasional. Walaupun Malaysia dan negaranya lainnya berhasil memberikan bantuan kepada etnis Rohingya, terutama Indonesia juga telah melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar lewat Perdana Menteri untuk menghentikan kekerasan terhadap orang-orang Rohingya di wilayah Rakhine, tetap saja belum bisa karena kuncinya ada di militer Myanmar dan pemimpinnya. Adanya kepentingan yang menjadikan etnis Rohingya sebagai korban dari tindakan pemerintah Myanmar yang terus berlanjut. Walaupun upaya Malaysia dan negara lainnya belum maksimal dalam membantu Rohingya, setidaknya mereka patut diberi apresiasi, dan masih peduli dengan etnis Rohingya.

REFERENSI

Buku

- Mas'ood, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional Dan Metode, Lp3s: Jakarta, 1990.
- Suyanto Bagong. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.
- Suprpto. Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, Dan Perilaku. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997.
- Atkinson, Rita, dkk. Pengantar Psikologi Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sobur, 1999.
- Alex. Psikologi Umum. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Djelantik, Sukawarsini. Asia Pasifik: Konflik, Kerjasama, dan Relasi dan Antar Kawasan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Rawls, John. Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hartati, A,Y. Konflik Etnis Myanmar Studi Eksistensi Rohingya ditengah Tekanan Pemerintah. Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2013.
- Hiariej, O,S. Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Forsythe, David P. Human Rights in International Relations. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Rahmat, A, N. Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Julia Hoffman, Andre Nolkaemper, and Isabelle Swerisses, Responsibility to Protect -From Principle to Practice, Amsterdam: Pallas Publication and Amsterdam University Press, 2012.
- United Nations Development Programme. New Dimensions of Human Security. New York: Oxford University, 1994.
- Wallensteen, Peter. Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and the Global System. Wiltshire: SAGE Publications, 2002.
- Weatherbee, Donald E. International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. 2nd Ed. Maryland: Rowman & Littlefield, 2009.
- Webel, Charles P. Terror, Terrorism, and the Human Condition. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Achmad, Romsan. Pengantar Hukum pengungsi internasional : hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional, 2003 (Bandung : Sanic Offset), 75.
- L, Saraswati. Hak Asas Manusia, Teori Hukum dan. Kasus, 2006 (Jakarta : Filsafat. UI Press.
- Jackson, Robert dan Sorensen Georg . Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar.) 2014.

Jurnal

- Abdelkader, E. " The Rohingya Muslims in Myanmar," *Past, Present, and Future. Oregon Review of International Law*, 15 (July 2008): 393-401

- Achmad, Romsan. "Pengantar Hukum Pengungsi Internasional," *Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. 18 (Agustus 2003): 129-135.
- Alfi, Revolusi." Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ* 2 (Juni 2013): 185-190.
- Apriyanti, D. "Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan U Thein Sein," 19 (Januari 2014): 87-109.
- Asrieyani, D. "Peran Office of The High Commisioner for Human Right," *Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar*. 24 (January 2012): 99.
- Blomquist, R. "Ethno-Demographic Dynamics of the Rohingya-Buddhist Conflict," *Georgetown Journal of Asian Affairs*. 18 (June 2016): 231-240.
- Marelda, Santa. "Responsibility to Protect," *Suatu Tanggung Jawab dalam Kedaulatan Negara*. 27 (July 2016): 145.
- International Orgaisation for Migration (IOM). *Irregular Maritime Migration in the Bay of Bengal: The Challenges of Protection, Management and Cooperation*. Migration Policy Institute, 2015.
- Muhamad, Simela Victor." Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia dan ASEAN," *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*. 10 (Mei 2015): 51-65.
- Robinson, Mary. " Connecting Human Rights, Human Development, and Human Security," *Dalam Wilson, Richard Ashby (ed.) Human Rights in the War on Terror*. 12 (July 2005):308-316.
- Triyana, Heribertus Jaka. "Tinjauan Yuridis tentang Badan HAM ASEAN dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Mimbar Hukum*, 23 (Maret 2011): 431-645.
- R, Blomquist " Ethno-demographi dynamics of the rohingya buddhist conflict," *Georgetown journal of asian affairs* 02 (June 2016) : 94
- D, Asrieyani " peran office of the high commissioner for human right dalam penyelesaian kasus genosida etnis rohingya di Myanmar," *Jurnal Universitas Mulawarman* 19 (January 2013) : 41.
- Amalia, Lady. 2016. —Efektivitas ASEAN Torism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol 5, No. 1.
- Deni, Fitra dan Pian Sopian. 2017. |Peran ASEAN Tourism Forum Dalam Meningkatkan Pariwisata Indonesia Periode 2011-2015|. *Jurnal International & Diplomacy*, Vol. 2, No. 2.
- Apriyanti, Devi. 2014. "Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar pada

Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau, Vol.1 No.2.

Department of Economic and Social Affairs: Population Division. 2015. —World Population Prospects (Key findings & advance tables). United Nations, New York.

Michalon, Martin. —Tourism(s) and the way to Democracy in Myanmar. Asian Journal of Tourism Research. [jurnal on-line] tersedia di file:///C:/Users/OWNER/Downloads/Tourisms_and_the_way_to_Democracy_in_Myanmar.pdf diakses pada Kamis, 10 Mei 2018.

Somantri, Gumilar Rusliwa. 1995. —Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2.

Taylor, Robert H. 2012. —Myanmar : from Army Rule to Constitutional Rule. Jurnal Asian Affairs, Vol. XLIII, No. II.

The Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB). 2015. —Myanmar Tourism Sector Wide Impact Assessment. Published by MCRB, DIHR and IHRB.

Vannarith, Chheang. 2013. —Tourism and Regional Integration in Southeast Asia. Institute of Developing Economics Japan External Trade Organization, V.R.F Series , Vol. 481

Tri, Joko Waluyo 2016 ” Konflik tak seimbang Etnis Rohingya dan Etnis rakhine di Myanmar konflik tak seimbang,” jurnal transasional.

Xiong, D. H. 2015 “Rohingya Refugee Crisis: Testing Malaysia's ASEAN Chairmanship” (RSIS COMMENTARY, 1-3.

Skripsi

Elsa Fahmi Wijayanti. 2017. The Policy of Malaysia Towards Rohingya refugees in 2015. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fitri Khairani Aldira Situmeang. 2017. Peran ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) terhadap industri pariwisata Myanmar tahun 2014-2016. Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

Federation in Malaysian. Available at:-
http://www.malaysian.mid.ru/text_18.html
<http://www.axisglobe.com/article.asp?article=213>.

Sejarah hubungan Malaysia – Myanmar, pada <http://rbth.indonesia>.

<https://www.Malaysiakini.com/>.
News/364103.

<https://www.Merdeka.com/>peristiwa/seberapa-ku-militer-myanmar-dibanding-indonesia-dan-malaysia.html.

<http://m.tempo.co/read/.news/2016/12/09/07836874/ini-beda-ancaman-kebebasan-pers-di-indonesia-dan-malaysia>.

https://www.academia.edu/16464458/Dinamika_Konflik_Internal_Etnis_Rohingya_dengan_Pemerintah_Myanmar_1978-2012?auto=download.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38237736> (diakses pada 12 April 2019).

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161222161900-106-181571/malaysia-tampik-campuri-indonesia-soal-rohingya> (diakses pada 12 Januari 2019).

https://www.academia.edu/16464458/Dinamika_Konflik_Internal_Etnis_Rohingya_dengan_Pemerintah_Myanmar_1978-2012?auto=download. (diakses pada 17 Maret 2019).

The ASEAN Secretariat. - ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025. [laporan on-line] tersedia di <http://www.asean.org/storage/2012/05/A-TSP-20162025.pdf> diakses pada Jumat, 04 Januari 2019.

Trading Economics. - Myanmar Tourist Arrivals. [laporan on-line] tersedia di <https://tradingeconomics.com/myanmar/tourist-arrivals> diakses pada Sabtu, 12 Januari 2019.

The Newyork Times. “Victory by Aung San Suu Kyi’s Party Catches One

Group Off Guard: The Government. [berita on-line] tersedia di <https://www.nytimes.com/2015/11/14/world/asia/aung-san-su-kyimyanmar-election.html> diakses pada Selasa, 13 Maret 2019.

Tourism Malaysia. “Sarawak all Set to Welcome Over 1,600 Delegates to ASEAN Tourism Forum 16-23 January 2014. [berita on-line] tersedia di <https://www.tourism.gov.my/media/view/sarawak-all-set-to-welcomeover-1-600-delegates-to-asean-tourism-forum-16-23-january-2014> diakses pada Sabtu, 28 Januari 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170906063032-106-239721/protes-krisis-rohingya-malaysia-panggil-dubes-myanmar> (diakses pada 19 April 2019)

11 Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied dalam <https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRS-CGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242> diakses pada 27 Desember 2018 pukul 21.45 WIB